

Penyebab Pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2023

Yuhani¹⁾ *, Akhmad Jufri²⁾

¹⁾haniyu73@gmail.com

¹⁾Universitas Mataram, Indonesia

²⁾Universitas Mataram, Indonesia

Jejak Artikel:

Upload: 30 Oktober 2024
Revisi: 07 Desember 2024
Diterima: 12 Desember 2024
Tersedia online: 13 Desember 2024

Keywords:

Pengangguran;
Pembangunan Ekonomi;
Nusa Tenggara Barat;
Analisis Regresi Linier Berganda;
Ordinary Least Square.

ABSTRAK

Tingkat pengangguran adalah indikator kunci posisi sosial ekonomi suatu daerah. Tingkat pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berfluktuasi setiap tahun, sama seperti di seluruh Indonesia. Tujuan dari studi kuantitatif ini adalah untuk meneliti bagaimana berbagai variabel yang mempengaruhi tingkat pengangguran di NTB antara tahun 2017 dan 2023. Menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, variabel-variabel yang diteliti adalah pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi (UMP), angkatan kerja, gini rasio, indeks harga konsumen (IHK). Dalam penelitian ini, digunakan model regresi deret waktu Ordinary Least Square (OLS) yang diolah menggunakan perangkat lunak Eviews 10. Temuan analisis menunjukkan bahwa sejumlah variabel, termasuk partisipasi angkatan kerja, UMP, dan pertumbuhan ekonomi, secara signifikan dan positif mempengaruhi tingkat pengangguran. Sementara itu, IHK dan gini rasio menunjukkan hubungan yang menguntungkan, meskipun tidak signifikan. Secara keseluruhan, variabel-variabel tersebut memiliki dampak yang cukup besar terhadap tingkat pengangguran NTB dari tahun 2017 hingga 2023. Diharapkan bahwa kesimpulan penelitian ini akan memberikan pencerahan tentang variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat pengangguran dan digunakan sebagai panduan oleh pemerintah Provinsi NTB dalam mengembangkan rencana untuk menurunkan tingkat pengangguran.

PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia tengah berjuang menghadapi masalah seperti pengangguran sebagai negara berkembang. Menurut Sukirno, mereka yang menganggur adalah mereka yang sebelumnya telah menjadi bagian dari pasar tenaga kerja dan secara aktif mencari pekerjaan pada tingkat gaji tertentu tetapi belum berhasil mendapatkan posisi tersebut (Filiarsari & Setiawan, 2021). Karena memengaruhi begitu banyak metrik ekonomi lainnya, masalah pengangguran memiliki banyak sisi. Metrik utama dalam menentukan tingkat pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang merupakan rasio jumlah orang yang menganggur terhadap

* Corresponding author

seluruh angkatan kerja. Tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di provinsi NTB berfluktuasi antara tahun 2017 dan 2023.

Tabel 1. TPT Provinsi NTB

Tahun	TPT
2017	3,32
2018	3,72
2019	3,42
2020	4,22
2021	3,01
2022	2,89
2023	2,80

Sumber: BPS Provinsi NTB

Peningkatan atau penurunan ekonomi dapat berdampak pada tingkat pengangguran. Kemampuan suatu negara dalam menghasilkan komoditas dan jasa merupakan indikator utama pembangunan ekonominya. Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil yang dicapai. Meningkatnya permintaan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja baru dapat terjadi akibat korelasi antara penggunaan lebih banyak orang dan produksi yang lebih tinggi (Bakar & Faisal, 2022). Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selama tujuh tahun terakhir, PDRB provinsi NTB telah menunjukkan perubahan tahunan yang substansial. Pada tahun 2017, PDRB NTB tercatat sebesar 94.608,21 miliar rupiah, namun mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 90.349,13 miliar rupiah. Setelah penurunan tersebut, PDRB kembali menunjukkan peningkatan secara bertahap, meskipun juga sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi. Namun, sejak tahun 2021, PDRB NTB cenderung mengalami kenaikan hingga mencapai 103.905,92 miliar rupiah pada tahun 2023.

Upah merupakan tanda terima yang diberikan kepada pekerja sebagai kompensasi bagi pengusaha atas pekerjaan atau layanan yang telah mereka selesaikan. Upah sering kali dibayarkan dalam bentuk uang dan berdasarkan perjanjian kerja, menurut Sumarsono sebagaimana dinyatakan dalam Sari dan Kafrawi Mahmud (2023). Pekerja dan keluarganya mendapatkan tunjangan di atas gaji pokok mereka. Tabel 2 menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB terus meningkat selama tujuh tahun terakhir.

Tabel 2. UMP Provinsi NTB

Tahun	UMP (Rupiah)
2017	1.631,190
2018	1.825,000
2019	2.012,610
2020	2.183,883
2021	2.183,883
2022	2.207,212
2023	2.371,407

Sumber: BPS Provinsi NTB

Setiap individu yang berusia minimal lima belas tahun dan terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai karyawan, pekerja tidak aktif, maupun pengangguran, termasuk dalam kategori angkatan kerja (BPS Provinsi NTB, 2024). Angka Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini, TPAK di Provinsi

NTB menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2023.

Tabel 3. TPAK Provinsi NTB

Tahun	TPAK
2017	68,49
2018	65,91
2019	68,65
2020	70,57
2021	70,57
2022	70,93
2023	73,31

Sumber: BPS Provinsi NTB

Lebih lanjut, gini rasio yang mengukur ketimpangan pendapatan, merupakan komponen lain yang memengaruhi tingkat pengangguran. Ketimpangan pendapatan terjadi ketika terdapat kesenjangan yang signifikan antara kalangan kaya dan kalangan kurang mampu. Semakin lebar ketimpangan pendapatan, semakin tidak merata distribusi pendapatan di masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk turun tangan dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan distribusi pendapatan yang adil, sehingga setiap orang dapat memperoleh manfaat dari kemajuan tersebut. Ketimpangan pendapatan suatu populasi dapat diukur menggunakan indikator gini rasio (Anwar, 2023). Gini rasio di Provinsi NTB menunjukkan variasi yang relatif stabil dari tahun 2017 hingga 2023. Pada tahun 2017, gini rasio tercatat sebesar 0,378 dan meningkat menjadi 0,391 pada tahun 2018. Penurunan menjadi 0,374 terjadi pada tahun 2019. Namun, indeks gini di Provinsi NTB sedikit berfluktuasi dari tahun ke tahun, dengan puncaknya pada angka 0,386 pada tahun 2020. Selanjutnya, indeks gini sedikit menurun menjadi 0,384 pada tahun 2021 dan turun lebih jauh menjadi 0,374 pada tahun 2022. Akan tetapi, pada tahun 2023, indeks gini kembali naik menjadi 0,379.

Selain itu, Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan komponen lain yang dikabarkan memengaruhi tingkat pengangguran. IHK adalah ukuran perubahan rata-rata harga sekelompok barang dan jasa yang digunakan oleh rumah tangga selama periode waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan besaran kenaikan harga barang dan jasa tersebut (inflasi) atau penurunan harga (deflasi) (Edukasi, 2017). Di Provinsi NTB, IHK pada tahun 2017 tercatat sebesar 128,18 dan meningkat menjadi 135,67 pada tahun 2019. Namun, terjadi penurunan tajam pada tahun 2020, dengan IHK mencapai angka 103,33. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh pandemi COVID-19, yang membatasi aktivitas ekonomi dan memengaruhi harga barang serta jasa. Kecenderungan kenaikan IHK mulai terlihat sejak tahun 2021, hingga akhirnya mencapai angka 115,56 pada tahun 2023.

Menurut sebuah studi oleh Nababan et al. (2023) berjudul "Pengaruh Angkatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Papua Barat dari tahun 2017 hingga 2021," angkatan kerja memiliki dampak positif yang sangat kecil terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi tersebut antara tahun 2017 dan 2021. Sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka di provinsi tersebut selama periode yang sama menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki dampak negatif yang sangat besar.

Dalam penelitian yang berbeda ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan angkatan kerja memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jambi. Dampak ini bersifat parsial dan simultan, menurut Kurniawan dkk. (2021).

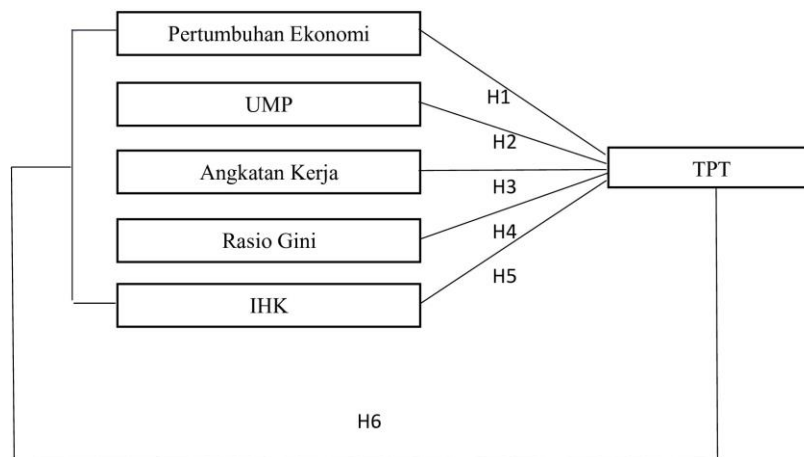
Lestari dan Asnidar kemudian melakukan penelitian tentang pengaruh angkatan kerja dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Kota Langsa (2023). Menurut temuan penelitian, pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

pengangguran di Kota Langsa, tetapi angkatan kerja memiliki dampak negatif yang cukup besar. Temuan studi F-Statistik juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja memiliki dampak pada tingkat pengangguran di Kota Langsa.

Studi yang dilakukan oleh Herawati dan Asrahmaulyana tahun 2024 dengan judul Perubahan Angkatan Kerja, Tingkat Upah, dan Produk Domestik Bruto (PDB) menemukan bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Sinjai dipengaruhi secara signifikan oleh Angkatan Kerja. Hubungan antara tingkat upah dengan tingkat pengangguran setempat tidak menunjukkan signifikansi secara statistik. Pengangguran di Kabupaten Sinjai sangat dipengaruhi oleh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Selain itu, seperti yang ditunjukkan oleh studi yang dilakukan oleh Wirawan (2018) tentang topik ini, hubungan antara PDRB, inflasi, dan gini rasio adalah 0,936, yang masuk ke dalam kategori "sangat kuat." Ini menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta. Analisis parsial menunjukkan bahwa, meskipun inflasi dan gini rasio tidak memiliki pengaruh yang signifikan, PDRB memiliki pengaruh yang signifikan.

Hal di atas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka rentan terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi, UMP, angkatan kerja, gini rasio, dan IHK. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi NTB sensitif terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi, UMP, angkatan kerja, gini rasio, dan IHK. Pada Gambar 1 di bawah ini, Anda dapat melihat skema kerangka kerja ini.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Adapun rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran.
- H2: Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara UMP dengan tingkat pengangguran.
- H3: Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara angkatan kerja dengan tingkat pengangguran.
- H4: Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara gini rasio dengan tingkat pengangguran.
- H5: Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara IHK dengan tingkat pengangguran.

H6: Diduga pertumbuhan ekonomi, UMP, angkatan kerja, gini rasio dan IHK berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tingkat pengangguran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang didasarkan pada pengukuran matematis dan numerik sebagai metodologi utamanya. Lokasi penelitian adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan periode penelitian selama 7 tahun menggunakan data sekunder. Dalam penelitian ini, terdapat satu variabel dependen dan lima variabel independen. Tingkat pengangguran, yang merupakan variabel dependen, menjadi variabel yang terpengaruh oleh faktor-faktor lain. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi pertumbuhan ekonomi, upah minimum di provinsi tersebut, angkatan kerja, gini rasio, dan indeks harga konsumen (IHK), yang berpotensi memengaruhi tingkat pengangguran. Dengan demikian, peneliti menggunakan 42 data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB sebagai sumber informasi utama dalam penelitian ini.

Tabel 4. Variabel Penelitian

PERIODE	TPT (%)	PDRB (MILIARRUPIAH)	UMP (RUPIAH)	TPAK (%)	GINI RASIO	IHK
2017	3,32	94.608,21	1.631,190	68,49	0,378	128,18
2018	3,72	90.349,13	1.825,000	65,91	0,391	130,73
2019	3,42	93.872,44	2.012,610	68,65	0,374	135,67
2020	4,22	93.288,87	2.183,883	70,57	0,386	103,33
2021	3,01	95.437,86	2.183,883	70,57	0,384	105,31
2022	2,89	102.073,66	2.207,212	70,93	0,374	112,28
2023	2,8	103.905,92	2.371,407	73,31	0,375	115,56

Sumber: BPS NTB

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis regresi linier berganda yang diolah dengan perangkat lunak Eviews 10. Adapun model persamaan dalam penelitian ini menggunakan logaritma (Log) untuk menyesuaikan satuan setiap variabel, sehingga tidak menghasilkan koefisien yang selaras sebagaimana berikut ini.

$$\text{LogTPT} = \alpha + \beta_1\text{LogPE} + \beta_2\text{LogUMP} + \beta_3\text{LogAK} + \beta_4\text{LogGR} + \beta_5\text{LogIHK} + \varepsilon \quad (1)$$

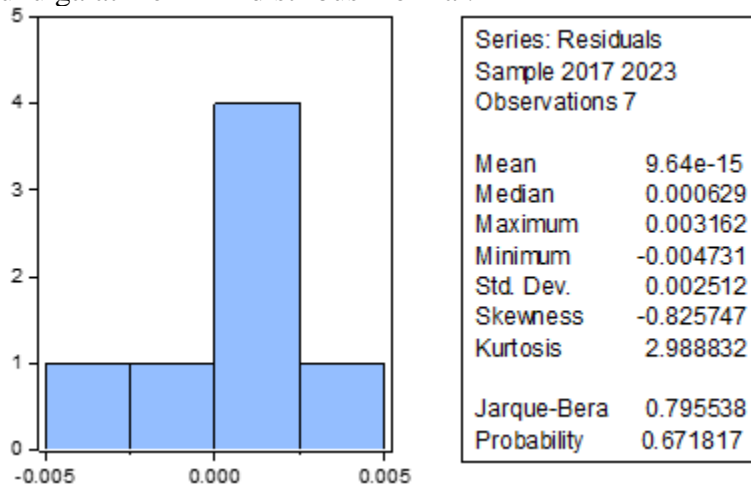
Dimana: LogTPT= Log Pengangguran Terbuka; α = Konstanta; $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = Koefisien Regresi Variabel Independen; LogPE= Log Pertumbuhan Ekonomi; LogUMP=Log Upah Minium Provinsi; LogGR=Log Gini Rasio; LogIHK=Log Indeks Harga Konsumen; ε = Error Term

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah melakukan uji asumsi klasik, dimulai dengan uji normalitas untuk memastikan bahwa data sampel yang digunakan berdistribusi normal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa model penelitian ini memenuhi kriteria Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) dan bebas dari bias. Selanjutnya, dilakukan uji multikolinearitas untuk mengetahui apakah terdapat hubungan signifikan antar variabel independen secara linier. Ketiga, uji homoskedastisitas bertujuan untuk memverifikasi apakah varians residual konsisten di seluruh variabel independen. Keempat, uji autokorelasi dilakukan untuk memastikan tidak ada korelasi antara periode dalam model regresi linier dengan periode sebelumnya. Tujuan keseluruhan dari uji-uji ini adalah untuk menghasilkan temuan yang dapat dipercaya. Selain itu,

dilakukan analisis koefisien determinasi R-Kuadrat bersama dengan uji F simultan dan uji t parsial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengetahui apakah sekumpulan data atau distribusi variabel terdistribusi normal adalah tujuan dari uji normalitas. Jika nilai probabilitas Jarque-Bera lebih besar dari 0,05, dapat dikatakan bahwa suku galat memiliki distribusi normal.



Sumber: *Eviews-10*

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Nilai probabilitas Jarque-Bera adalah $0,795538 > 0,05$, seperti yang terungkap dalam temuan uji normalitas (gambar di atas). Oleh karena itu, data diasumsikan mengikuti distribusi normal.

Tujuan uji multikolinieritas adalah untuk menentukan apakah variabel independen penelitian saling terkait.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

	LogPE	LogUMP	LogAK	LogGR	LogIHK
LogPE	1	0.62984	0.84319	-0.7169	-0.329411
LogUMP	0.629844	1	0.89733	-0.2371	-0.661842
LogAK	0.843188	0.89733	1	-0.3894	-0.53379
LogGR	-0.716912	-0.2371	-0.3894	1	-0.169125
LogIHK	-0.329411	-0.6618	-0.5338	-0.1691	1.000000

Sumber: *Eviews-10*

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan adanya korelasi berikut: korelasi sebesar 0,629844 antara pertumbuhan ekonomi dengan UMP; korelasi sebesar 0,843188 antara tenaga kerja dengan gini rasio; korelasi sebesar -0,716912 antara tenaga kerja dengan IHK; dan korelasi sebesar -0,329411 antara gini rasio dengan IHK. Lebih lanjut, ditemukan nilai korelasi sebesar -0,661842 antara pertumbuhan ekonomi dengan IHK. Temuan menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas dengan model ini, karena koefisien korelasi kelima variabel kurang dari 0,90.

Uji homoskedastisitas bertujuan untuk memeriksa apakah varians residual tetap konsisten

di seluruh kombinasi variabel independen. Jika varians residual tidak berubah, maka uji homoskedastisitas dapat dianggap memenuhi asumsi. Heteroskedastisitas terjadi jika nilai probabilitas kurang dari 0,05 dan sebaliknya jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 6. Hasil Uji Homoskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
F-statistic	0.383356	Prob. F(5,1)	0.8328
Obs*R-squared	4.600092	Prob. Chi-Square(5)	0.4666
Scaled explained SS	0.093355	Prob. Chi-Square(5)	0.9999

Sumber: Eviews-10

Nilai Prob. Chi-Square sebesar 0,4666 > 0,05 ditunjukkan oleh hasil uji Breusch-Pagan-Godfrey. Itulah sebabnya kita dapat mengatakan bahwa varians residual bersifat konstan; dengan kata lain, homoskedastisitas terpenuhi.

Dalam model regresi linier, uji autokorelasi digunakan untuk mengidentifikasi adanya korelasi antarperiode.

Tabel 7. Hasil Uji Run Test

R1	5.000000
R2	0.224257

Sumber: Eviews-10

Nilai Uji Run dengan probabilitas R² sebesar 0,224257 diperoleh berdasarkan temuan analisis uji autokorelasi yang menggunakan uji Run Test, sebagaimana dilaporkan pada Tabel 7. Dengan nilai 0,224257 yang lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa uji autokorelasi berhasil atau tidak ditemukan gejala autokorelasi.

Model Regresi Linier Berganda

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	25.17080	1.154779	21.79707	0.0292
LOGPE	2.902111	0.214808	13.51025	0.0470
LOGUMP	2.155302	0.070904	30.39748	0.0209
LOGAK	-9.012611	0.286630	-31.44341	0.0202
LOGGR	6.334220	0.345919	18.31130	0.0347
LOGIHK	0.379058	0.042118	8.999861	0.0704
R-squared	0.999707	Mean dependent var		1.196569
Adjusted R-squared	0.998242	S.D. dependent var		0.146711
S.E. of regression	0.006152	Akaike info criterion		-7.575646
Sum squared resid	3.78E-05	Schwarz criterion		-7.622009
Log likelihood	32.51476	Hannan-Quinn criter.		-8.148681
F-statistic	682.2182	Durbin-Watson stat		2.738036
Prob(F-statistic)	0.029059			

Sumber: Eviews-10

Persamaan berikut diturunkan menggunakan analisis regresi data deret waktu model Ordinary Least Square (OLS):

$$\text{LogTPT} = 25.17080 + 2.902111\text{LogPE} + 2.155302\text{LogUMP} - 9.012611\text{LogAK} + 6.334220\text{LogGR} + 0.379058\text{LogIHK} \quad (2)$$

Jika variabel pertumbuhan ekonomi (X1), UMP (X2), angkatan kerja (X3), gini rasio (X4),

dan IHK (X5) tetap konstan, maka tingkat pengangguran (Y) akan tetap pada 25,17080, seperti yang ditunjukkan oleh nilai konstanta positif sebesar 25,17080. Variabel pertumbuhan ekonomi (X1) memiliki koefisien regresi positif sebesar 2,902111, yang berarti tingkat pengangguran akan meningkat sebesar 2,902111% untuk setiap kenaikan 1% pada variabel pertumbuhan ekonomi. Koefisien regresi untuk variabel UMP (X2) sebesar 2,155302 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran akan meningkat sebesar 2,155302% untuk setiap kenaikan 1% pada UMP. Di sisi lain, variabel angkatan kerja (X3) memiliki koefisien regresi negatif sebesar -9,012611, yang menunjukkan penurunan tingkat pengangguran sebesar 9,012611% untuk setiap peningkatan 1% dalam angkatan kerja. Variabel gini rasio (X4) memiliki koefisien regresi positif sebesar 6,334220, yang berarti tingkat pengangguran akan meningkat sebesar 6,334220% untuk setiap kenaikan 1% dalam gini rasio. Sementara itu, koefisien regresi untuk variabel IHK (X5) sebesar 0,379058 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran akan meningkat sebesar 0,379058% untuk setiap kenaikan 1% dalam IHK.

Uji parsial digunakan untuk memeriksa dampak masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah. Ambang signifikansi sebesar 5% digunakan untuk membandingkan nilai probabilitas setiap variabel, guna menentukan apakah dampak yang diberikan signifikan.

Tabel 9. Hasil Uji t-Statistik

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	25.17080	1.154779	21.79707	0.0292
LOGPE	2.902111	0.214808	13.51025	0.0470
LOGUMP	2.155302	0.070904	30.39748	0.0209
LOGAK	-9.012611	0.286630	-31.44341	0.0202
LOGGR	6.334220	0.345919	18.31130	0.0347
LOGIHK	0.379058	0.042118	8.999861	0.0704

Sumber: *Eviews-10*

Berdasarkan data yang tertera dalam Tabel 9, variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0470 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis H1 dapat diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa, dengan tingkat kepercayaan 95%, tingkat pengangguran di Provinsi NTB dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, nilai probabilitas untuk variabel UMP adalah 0,0209 yang juga lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis H2 diterima. Dengan demikian, pada tingkat kepercayaan 95%, variabel UMP memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat pengangguran di NTB. Variabel angkatan kerja memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0202 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis H3 dapat diterima. Ini menunjukkan bahwa, pada tingkat kepercayaan 95%, variabel angkatan kerja memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi NTB. Selain itu, nilai probabilitas untuk variabel gini rasio adalah 0,0347 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis H4 diterima. Dengan demikian, pada tingkat kepercayaan 95%, variabel gini rasio memberikan dampak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi NTB. Namun, hipotesis H5 ditolak karena nilai probabilitas untuk variabel indeks harga konsumen (IHK) adalah 0,0347 yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa, pada tingkat kepercayaan 95%, variabel IHK tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi NTB.

Untuk memastikan apakah variabel-variabel independen memiliki dampak simultan pada variabel dependen, dilakukan uji F. Nilai probabilitas F-Statistik < 0,05 menunjukkan bahwa

variabel-variabel independen memiliki pengaruh simultan terhadap variabel dependen.

Tabel 10. Hasil Uji F

Prob(F-statistic)	0.029059
-------------------	----------

Sumber: Eviews-10

Nilai statistik F yang mengukur kemungkinan tercatat sebesar 0,029059, yang lebih kecil dari 0,05, sebagaimana tercantum dalam tabel di atas. Oleh karena itu, hipotesis H6 diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi, UMP, angkatan kerja, gini rasio, dan IHK secara simultan memiliki dampak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi NTB.

Koefisien Determinasi (R^2) mengukur seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen.

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.999707
-----------	----------

Sumber: Eviews-10

Menurut nilai R-Squared sebesar 0,999707, maka 99% variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Oleh karena itu, variabel-variabel berikut dapat digunakan untuk memperkirakan tingkat pengangguran di provinsi NTB: pertumbuhan ekonomi, UMP, jumlah pekerja, gini rasio, dan IHK. Namun, sisa 1% dapat dijelaskan oleh variabel di luar cakupan penelitian ini.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran

Ketika perekonomian tumbuh dengan baik, tingkat pengangguran cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan analisis pada tingkat signifikansi 0,05, diperoleh nilai t sebesar 13,51 dengan probabilitas 0,0470 dan koefisien sebesar 2,902. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan elastisitas pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan meningkatkan tingkat pengangguran sebesar 2,9%. Penelitian lain yang memiliki kesimpulan serupa dilakukan oleh Neno et al. (2024), yang meneliti 14 lokasi di kawasan Teluk Tomini pada periode 2017 hingga 2021, dan menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka secara positif dan signifikan. Namun, temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Akmal Abdul Aziz & Julia (2022), yang menunjukkan bahwa ekspansi ekonomi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat pengangguran di 27 kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

Menurut penelitian ini, ekspansi ekonomi menurunkan tingkat pengangguran. Dengan kata lain, tingkat pengangguran yang tinggi merupakan tanda ekonomi yang sehat. Pengangguran seharusnya turun sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi, setidaknya secara teori. Namun, hal ini disebabkan oleh kurangnya keterampilan di kalangan tenaga kerja, terutama di era industri 4.0, dan pembangunan ekonomi yang terlalu bergantung pada industri padat modal yang tidak tersebar merata di antara berbagai daerah. Akibatnya, tidak ada cukup lapangan kerja untuk semua orang, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kombinasi peningkatan output dan pelatihan karyawan yang lebih baik akan diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini.

Temuan studi ini bertentangan dengan realitas pasar kerja di provinsi NTB. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 4, tingkat pengangguran di NTB sebenarnya cenderung turun seiring dengan peningkatan PDRB. Kejadian ini konsisten dengan Hukum Okun pada prinsipnya.

Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran

Upah minimum provinsi (UMP) memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap

Tingkat pengangguran. Berdasarkan analisis pada tingkat signifikansi 0,05, diperoleh nilai t sebesar 30,39 dengan probabilitas 0,0209 dan koefisien sebesar 2,155. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan elastisitas UMP sebesar 1% akan meningkatkan tingkat pengangguran sebesar 2,1%. Analisis ini mengonfirmasi temuan Widiyanti dkk. (2024) bahwa variabel UMP berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat pengangguran di Provinsi NTB. Terdapat bukti yang bertentangan antara hasil penelitian ini dengan hasil penelitian yang menemukan hubungan negatif dan signifikan secara statistik antara upah minimum dengan tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2011-2017. (Sembiring & Sasongko, 2019).

Kenaikan UMP berpotensi menyebabkan peningkatan pengangguran secara signifikan apabila perusahaan atau sektor industri tidak mampu mengatasi kenaikan biaya tenaga kerja. Ketika UMP mengalami peningkatan, perusahaan diharuskan membayar lebih untuk setiap karyawan, yang bisa menjadi tantangan bagi usaha kecil atau sektor yang beroperasi dengan margin keuntungan yang minim. Akibatnya, perusahaan mungkin mengambil keputusan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja, mem-PHK karyawan, atau beralih ke teknologi otomatis untuk menekan pengeluaran. Lebih jauh, kenaikan UMP yang terlalu cepat atau tinggi dapat membuat perusahaan ragu untuk merekrut tenaga kerja baru, karena biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tidak sebanding dengan tingkat produktivitas yang dapat dicapai. Hal ini memiliki dampak yang lebih besar pada sektor yang padat karya dan bagi pekerja dengan keterampilan rendah, sehingga berpotensi memperburuk angka pengangguran di kalangan kelompok tersebut.

Menurut teori Keynes, bisnis akan mengurangi jumlah staf ketika gaji tetap lebih tinggi daripada titik keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Hasil ini konsisten dengan gagasan tersebut. Kenaikan tingkat pengangguran dan pengurangan rotasi tenaga kerja adalah kemungkinan hasil dari skenario ini (Mankiw, 2006).

Hasil penelitian ini tidak selaras dengan kondisi ketenagakerjaan di provinsi NTB. Secara umum, kenaikan UMP tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap peningkatan angka pengangguran di provinsi NTB. Sebaliknya, adanya tren penurunan tingkat pengangguran mengindikasikan bahwa peningkatan UMP mungkin berkaitan dengan pertumbuhan lapangan kerja atau perbaikan kondisi ekonomi NTB yang lebih mampu menyerap tenaga kerja.

Pengaruh Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran

Angkatan kerja memiliki peran krusial dalam menurunkan angka pengangguran. Berdasarkan analisis pada tingkat signifikansi 0,05, diperoleh nilai t sebesar -31,44 dengan probabilitas 0,0202 dan koefisien sebesar -9,012. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan elastisitas angkatan kerja sebesar 1% akan menurunkan tingkat pengangguran sebesar 9,0%. Konsisten dengan penelitian sebelumnya (Filiyanti & Setiawan, 2021), analisis ini menemukan bahwa variabel tenaga kerja secara signifikan dan negatif mempengaruhi angka pengangguran di Provinsi Banten dari tahun 2002 hingga 2019. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian yang menunjukkan hubungan positif dan signifikan secara statistik antara jumlah tenaga kerja dan angka pengangguran di Indonesia (Pasuria & Triwahyuningtyas, 2022).

Meningkatkan kemungkinan kerja dan melatih pekerja untuk memenuhi standar industri akan membantu menurunkan angka pengangguran ke tingkat yang lebih mudah dikelola. Tenaga kerja yang lebih besar berarti lebih banyak orang yang siap secara fisik dan mental untuk bekerja, yang berarti potensi yang lebih besar untuk peningkatan output dan ekspansi PDB. NTB memiliki peluang untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal karena keunggulan daerah tersebut dalam berbagai sektor seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan pelatihan keterampilan di bidang-bidang tersebut dan menarik investasi dari

sumber-sumber regional dan nasional. Selain itu, peluang kerja baru dapat diciptakan bagi tenaga kerja melalui upaya pemerintah yang menargetkan pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tabel 4 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Provinsi NTB mengalami penurunan sementara tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami peningkatan, yang sejalan dengan simpulan penelitian ini.

Pengaruh Gini rasio Terhadap Tingkat Pengangguran

Jika melihat tingkat pengangguran, gini rasio memiliki pengaruh yang signifikan dan menguntungkan. Berdasarkan analisis pada tingkat signifikansi 0,05, diperoleh nilai t sebesar 18,31 dengan probabilitas 0,0347 dan koefisien sebesar 6,334. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan elastisitas gini rasio sebesar 1% akan meningkatkan tingkat pengangguran sebesar 6,3%.

Kenaikan gini rasio yang mencerminkan peningkatan ketimpangan pendapatan dapat secara signifikan memperburuk tingkat pengangguran di NTB. Kesenjangan pendapatan yang meluas cenderung menghambat akses sebagian besar masyarakat terhadap pendidikan dan pelatihan kerja yang berkualitas, sehingga menyulitkan mereka untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja yang semakin ketat. Di NTB, dampak ini terutama terlihat pada sektor-sektor vital seperti pariwisata dan pertanian di mana banyak tenaga kerja mengalami kurang keterampilan atau tidak memiliki akses ke pekerjaan yang baik dan berkelanjutan. Ketika sebagian populasi terpinggirkan dari kesempatan kerja yang produktif, mereka menjadi lebih rentan terhadap pengangguran terutama dengan terbatasnya kesempatan di sektor formal. Oleh karena itu, kenaikan gini rasio di NTB tidak hanya memperburuk ketidaksetaraan ekonomi, tetapi juga mendorong peningkatan pengangguran akibat rendahnya daya saing tenaga kerja lokal. Penelitian terdahulu oleh (Anwar, 2023) menunjukkan bahwa gini rasio secara signifikan mempengaruhi tingkat pengangguran di Kalimantan Selatan dengan cara yang menguntungkan, dan hasil kami memberikan kepercayaan terhadap hal itu.

Pengaruh Indeks Harga Konsumen Terhadap Tingkat Pengangguran

Terdapat hubungan kecil namun positif antara tingkat pengangguran dan Indeks Harga Konsumen (IHK). Berdasarkan analisis pada tingkat signifikansi 0,05, diperoleh nilai t sebesar 8,999 dengan probabilitas 0,0704 dan koefisien sebesar 0,379. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan elastisitas indeks harga konsumen sebesar 1% akan meningkatkan tingkat pengangguran sebesar 0,3%.

Kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mencerminkan inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa, dapat berdampak pada tingkat pengangguran di NTB meskipun pengaruhnya tidak signifikan. Inflasi yang moderat cenderung tidak langsung menyebabkan pengangguran tinggi karena sektor-sektor kunci di NTB seperti pariwisata dan pertanian, tetap memiliki permintaan yang stabil. Dalam konteks ketenagakerjaan, kenaikan IHK lebih berdampak pada daya beli tenaga kerja dan biaya hidup daripada langsung mempengaruhi jumlah lowongan kerja. Namun, jika inflasi terus meningkat tanpa adanya penyesuaian upah atau bantuan ekonomi, daya beli pekerja akan tertekan yang dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan motivasi kerja. Dengan demikian, meskipun IHK yang naik tidak secara signifikan meningkatkan pengangguran di NTB, tetap perlu ada kebijakan yang menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan tenaga kerja agar tidak terjadi dampak jangka panjang pada ketenagakerjaan.

KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa dari tahun 2017 hingga 2023, terdapat korelasi positif yang signifikan secara statistik antara tingkat pengangguran Provinsi NTB, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum provinsi (UMP). Sebaliknya, angkatan kerja memiliki dampak besar dan negatif terhadap tingkat pengangguran di provinsi NTB, sementara Indeks Harga Konsumen (IHK) memiliki dampak kecil namun positif.

Pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, angkatan kerja, gini rasio, dan indeks harga konsumen memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi NTB selama periode tersebut secara bersamaan. Dengan nilai R-Square yang dilaporkan sebesar 0,99, variabel-variabel independen ini menyumbang 99% dari variasi dalam tingkat pengangguran terbuka, dengan variabel-variabel di luar cakupan penelitian menyumbang 1% sisanya.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah NTB sebaiknya melanjutkan upaya dalam menciptakan lapangan kerja dengan menitikberatkan perhatian pada sektor-sektor produktif demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, pengendalian pertumbuhan Upah Minimum Provinsi (UMP) perlu dilakukan agar tidak membebani sektor usaha khususnya UMKM, sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan angka pengangguran. Program pelatihan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar juga sangat diperlukan untuk menyelaraskan antara angkatan kerja dan permintaan tenaga kerja. Upaya mengurangi ketimpangan melalui kebijakan distribusi pendapatan yang adil serta mendorong kebijakan inflasi yang stabil juga penting untuk membantu menekan tingkat pengangguran di NTB.

REFERENSI

- Akmal Abdul Aziz, & Julia, A. (2022). Pengaruh Jumlah Industri, Upah Minimum, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 2(2), 400–410. <https://doi.org/10.29313/bcses.v2i2.3684>
- Anwar, K. (2023). Analisis Pengaruh Pendidikan dan Gini Rasio terhadap Tingkat Pengangguran di Kalimantan Selatan. *Jurnal Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 3(1), 9–18. <https://doi.org/10.35912/jahidik.v3i1.1993>
- Bakar, A., & Faisal, M. N. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Mimika. *Journal of Economics and Regional Science*, 2(2), 83–100. <https://doi.org/10.52421/jurnal-esensi.v2i2.227>
- Bastari, D. P. (2019). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja, rata-rata lama sekolah, dan upah minimum kabupaten/kota terhadap tingkat pengangguran di provinsi banten tahun 2010-2017. In *Skripsi*.
- BPS Provinsi NTB. (2024). *Angkatan Kerja Volume 12, 2024 2 0 2 3. 12*.
- Edukasi, P. (2017). *Inflasi dan Indeks Harga Konsumen*. <https://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id/inflasi-dan-indeks-harga-konsumen/>

- Filiasari, A., & Setiawan, A. H. (2021b). Pengaruh Angkatan Kerja, Upah, PDRB, dan Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten Tahun 2002-2019. *Diponegoro Journal of Economics*, 10(2), 1–10.
- Herawati, Asrahmaulyana, B. I. (2024). *Perubahan Angkatan Kerja , Tingkat Upah , dan Produk Domestik*. 4, 1–13.
- Kurniawan, R., Yulmardi, Y., & Bhakti, A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/10.53867/jea.v1i2.18>
- Lestari, R., & Asnidar, A. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Angkatan Kerja Terhadap Pengangguran di Kota Langsa. *Jurnal Orientasi Bisnis Dan Entrepreneurship (JOBS)*, 3(2), 131–139. <https://doi.org/10.33476/jobs.v3i2.2936>
- Mankiw, N. G. (2006). *Makroekonomi Edisi 6*. Erlangga, Jakarta.
- Nababan, A., Waimbo, D. E., & Maspaitella, M. (2023). Pengaruh Angkatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Papua Barat Tahun 2017 - 2021. *Lensa Ekonomi*, 16(02), 320. <https://doi.org/10.30862/lensa.v16i02.253>
- Neno, R. A., Saleh, S. E., Dai, S. I. S., & Mulyati, Y. (2024). *Jurnal Studi Ekonomi Dan Pembangunan (Jsep)*. 1(3), 84–101.
- Pasuria, S., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Pengaruh Angkatan Kerja, Pendidikan, Upah Minimum, Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(6), 795–808. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i6.94>
- Sari, W., & Kafrawi Mahmud, A. (2023). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Enrekang*.
- Sembiring, V. B. P., & Sasongko, G. (2019). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Upah Minimum, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran di Indonesia Periode 2011 – 2017. *International Journal of Social Science and Business*, 3(4), 430. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i4.21505>
- Widiantari, I. A. A., Sahri, S., & Suriadi, I. (2024). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Jumlah Penduduk, Dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2021. *Jurnal Oportunitas : Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 58–64. <https://doi.org/10.29303/oportunitas.v3i1.607>
- Wirawan, S. M. S. (2018). Pengaruh Produk Domestik Bruto, Inflasi Dan Gini rasio Terhadap Pengangguran Terbuka Di Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Good Governance*, 14(2), 149–159. <https://doi.org/10.32834/jgg.v14i2.15>